

LITIGASI

JURNAL ILMU HUKUM

Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Persepsi Mahasiswa

Mediasi Konflik Keraton Surakarta Melalui Penerapan *Local Wisdom*

Pendidikan Tentang Kesadaran Hukum Bagi Anak Bermasalah Hukum Di Lapas

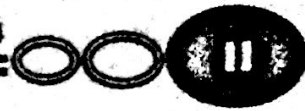
Implikasi Kegiatan Usaha Penitipan Dengan Pengelolaan (*Trust*) Dalam Aktivitas Perbankan Terhadap Pembaharuan Hukum Perdata Indonesia

Meningkatkan Kualitas Bahasa Indonesia Melalui Bahasa Indonesia Hukum Ilmiah

Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Bidang Politik Di Indonesia Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana

AKREDITASI
No. 56/DIKTI/Kep/2012

Jurnal Ilmu Hukum	Vol. 15 No.2	Hlm. 2320 - 2581	Bandung Oktober 2014	ISSN 0853 - 7100
-------------------	--------------	------------------	-------------------------	---------------------



DAFTAR ISI

HASIL PENELITIAN

Halaman 2320

Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dari Persepsi Mahasiswa.

Azhar | Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang.

Halaman 2370

Mediasi Konflik Keraton Surakarta Melalui Penerapan *Local Wisdom*.

Mulyanto dan Sutapa Mulja Widada | Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Solo.

Halaman 2394

Pendidikan Tentang Kesadaran Hukum Bagi Anak Bermasalah Hukum Di Lapas.

Arifin | STKIP 11 April Sumedang.

Halaman 2445

Implikasi Kegiatan Usaha Penitipan Dengan Pengelolaan (*Trust*) Dalam Aktivitas Perbankan Terhadap Pembaharuan Hukum Perdata Indonesia.

Tri Handayani dan Lastuti Abubakar | Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung.

ARTIKEL

Halaman 2487

Meningkatkan Kualitas Bahasa Indonesia Melalui Bahasa Indonesia Hukum Ilmiah.

Dheni Harmaen | Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan Bandung.

Halaman 2539

Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Bidang Politik Di Indonesia Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana.

T. Subaryah S. | Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

IMPLIKASI KEGIATAN USAHA PENITIPAN DENGAN PENGELOLAAN (TRUST) DALAM AKTIVITAS PERBANKAN TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM PERDATA INDONESIA

Tri Handayani

Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jl. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, Telp. (022) 2503271/6670718, Fax. (022) 6670718, HP. 081313407048 Email: t212h@yahoo.com

Lastuti Abubakar

Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jl. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, Telp. (022) 2503271/6670718, Fax. (022) 6670718, HP. 08122150155, Email: lastutiabubakar@yahoo.com

ABSTRAK

Terbitnya Peraturan Bank Indonesia (selanjutnya ditulis PBI) No: 14/7/PBI/2012 Tanggal 23 November 2012 Tentang Kegiatan *Trust* menambah jenis perjanjian yang berkembang dalam praktik perbankan. Dari sudut pandang hukum, konsep *trust* masih menimbulkan perdebatan, mengingat secara historis konsep *trust* berasal dari sistem hukum Anglo-Saxon yang mengenal *dual-ownership* yang tidak dikenal dalam Hukum Perdata Indonesia. Namun demikian, eksistensi perjanjian *trust* ini dimungkinkan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian. Dalam tataran praktis, penggunaan konsep *trust* ini akan bersinggungan dengan kepentingan pemilik dana dan penerima manfaat. Penelitian ini membahas beberapa aspek hukum seperti bagaimana kedudukan perjanjian *trust* dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia, bagaimana pertanggung jawaban bank selaku *trustee* bila terjadi permasalahan dalam kegiatan *trust* dan bagaimana implikasi dari kegiatan *trust* terhadap pembaharuan hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan *trust* merupakan perjanjian yang didasarkan pada sistem terbuka dan prinsip kebebasan dalam kontrak. Berdasarkan perjanjian, bank sebagai *trustee* harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul apabila memang diakibatkan oleh kesalahan bank dan perbuatan melawan hukum; mengingat konsep *trust* mengenal *dual ownership* yang tidak dikenal dalam sistem hukum benda Indonesia, maka diperlukan pembaruan hukum perdata untuk mengakomodasikan *dual ownership*.

Kata kunci: *Trust*, *dual ownership*, hukum perdata.